

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainability (keberlanjutan) menjadi suatu konsep pembangunan global sejak diperkenalkan pertama kali dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1972 sebagai akibat kekhawatiran terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan, dan dipopulerkan kembali melalui acara Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (Alvi, Nurhasanah, & Persada, 2018). Penerapan konsep keberlanjutan di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 pada amandemen keempat tahun 2002. Hingga saat ini Pemerintah tetap komitmen untuk menjalankan serta menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Keberlanjutan atau pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata akhir-akhir ini menjadi bagian dari kajian penting karena pembangunan sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Tahun 2023, selama 5 tahun terakhir secara rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sehingga sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas (migas). Dampak positif pembangunan pariwisata tidak terlepas dari peran serta fungsi wisata sebagai model pembangunan yang mampu menciptakan *multiplier effect* (efek berganda) secara ekonomi (Dharma, Yulianda, & Yulianto, 2021).

Peningkatan ekonomi, pemerataan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Jorgensen & McKercher (2019) menunjukkan bahwa pariwisata merupakan simbol pembangunan berkelanjutan, dijadikan agenda pembangunan oleh pemerintah, industri, dan menjadi harapan masyarakat miskin yang berada di sekitar lokasi wisata untuk memperoleh pendapatan dari adanya aktivitas pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pariwisata dominan memberikan dampak positif secara ekonomi. Namun, disisi lain keberadaan pariwisata dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Konsep keberlanjutan pariwisata (*tourism sustainability*) muncul sebagai bagian dari upaya memberikan solusi, meskipun pada dasarnya pariwisata berkelanjutan tetap tidak berkelanjutan (Jorgensen & McKercher, 2019).

Fenomena pariwisata tidak berkelanjutan dapat dilihat dari aktivitas manusia yang menumpuk di suatu wilayah pada dasarnya dapat menimbulkan efek emisi gas dan limbah sampah yang berpengaruh buruk terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Sehingga konsep *tourism sustainability* dihadirkan sebagai upaya untuk menjawab persoalan keberlanjutan melalui tiga indikator, yakni aspek keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Purvis, Mao, & Robinson (2019) menunjukkan bahwa terdapat tiga pilar *sustainability* yang terdiri *sustainability economic*, *sustainability society*, dan *sustainability environmental*. *Sustainability* diartikan sebuah keberlanjutan dalam pembangunan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Purvis et al. (2019) menunjukkan bahwa *Sustainability* memperhatikan serta mempertimbangkan aspek ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. Keberlanjutan (*sustainability*) dalam aspek ekonomi dapat dilihat dari adanya pembangunan pariwisata secara dominan berorientasi pada tujuan pencapaian peningkatan nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan saat ini dan masa mendatang. Aspek sosial, mengarah pada tingkat kemampuan masyarakat dalam memberikan dukungan baik melalui partisipasi secara langsung maupun secara emosional dalam menciptakan solidaritas sosial untuk menjamin kelangsungan pembangunan dan pengembangan pariwisata. Aspek lingkungan, menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, pembangunan memberi dampak positif pada kelestarian dan keberlangsungan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan.

Cendrakasih, Yudha, Yuliana, & Maharani (2021) menunjukkan bahwa analisis keberlanjutan wisata pantai dapat dilakukan melalui lima dimensi keberlanjutan, yakni dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan infrastruktur, serta hukum dan kelembagaan. Urgensi pengukuran keberlanjutan kelima dimensi tersebut bahwa keberlanjutan pariwisata dibangun dan dikembangkan mampu memberikan jaminan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam jangka panjang. Aspek atau dimensi ekologi termasuk kategori kurang berkelanjutan disebabkan lebar pantai kecil, aspek ekonomi dan sosial buruk tidak berkelanjutan karena diduga potensi pasar wisata dan tingkat pendidikan masyarakat rendah, sedangkan teknologi-infrastruktur bernilai buruk dan tidak berkelanjutan karena buruknya sarana dan prasarana jalan yang sulit ditempuh.

Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dalam jangka panjang membentuk sistem ketahanan sosial yang dapat dilihat dari adanya kepedulian dan solidaritas masyarakat yang tinggi serta memperlihatkan bahwa kondisi lingkungan tetap terjaga dan terawat dengan baik. Hysa, Kruja, Rehman, & Laurenti (2020) menunjukkan bahwa *Tourism sustainability* terintegrasi tidak hanya memperhatikan dampak lingkungan, melainkan juga dampak ekonomi dan sosial. Terdapat peluang peningkatan kesempatan kerja bagi kehidupan masyarakat dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di tingkat nasional, wilayah provinsi maupun tingkat daerah kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 menjadikan sektor pariwisata menjadi bagian dari program pembangunan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat dan desa dengan menerapkan pembangunan desa berdasarkan tema khusus (desa tematik), pemberdayaan UMKM, eksplorasi potensi alam, dan peningkatan kapasitas pariwisata. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pengembangan kapasitas pariwisata dengan mendorong pertumbuhan destinasi wisata baru. Namun, peningkatan kuantitas pariwisata tersebut diduga tidak diimbangi dengan upaya optimal pengelolaan keberlanjutan pariwisata sehingga antusiasme pengunjung hanya terjadi di masa-masa awal pembukaan obyek wisata.

Konsep pengelolaan obyek wisata cenderung berfokus pada optimalisasi perolehan keuntungan secara ekonomi. Namun, tidak memperhatikan secara

serius tentang pengelolaan keberlanjutan pariwisata secara ekonomi, sosial, infrastruktur, kelembangaan, ataupun lingkungan Sehingga tingginya tingkat pengunjung wisata meninggalkan masalah. Di samping itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan di lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah obyek wisata di Pamekasan. Bertambahnya jumlah obyek wisata tersebut menunjukkan bahwa antusiasme pengembangan sektor pariwisata meningkat positif dan signifikan. Namun, peningkatan kapasitas pariwisata tidak disertai oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sehingga hal ini menjadi masalah yang harus diatasi.

Tabel 1.1 Kapasitas Pariwisata Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Wisata	Nama Objek Wisata	Jumlah Pengunjung
2019	6	Api Tak Kunjung Padam, Pantai Jumiang, Talang Siring, Pasarean Batu Ampar, Makam Ronggosukowati, Museum Mandhilaras	158.084
2020	6	Api Tak Kunjung Padam, Pantai Jumiang, Talang Siring, Pasarean Batu Ampar, Makam Ronggosukowati, Museum Mandhilaras	0
2021	14	Api Tak Kunjung Padam, Pantai Jumiang, Pantai Talang Siring, Pasarean Batu Ampar, Museum Mandhilaras, Ekowisata Mangrove, Kampoeng Toron Samalem, Puncak Ratu, Kampung Durian, Bukit Kehi, Bukit Brukoh, Vihara Avalokitesvara, Wisata Sawah, Eduwisata Garam	242.665
2022	12	Pantai Jumiang, Pantai Talang Siring, Ekowisata Mangrove Lembung, Kampoeng Toron Samalem, Puncak Ratu, Kampung Durian, Bukit Kehi, Museum Mandhilaras, Wisata Sawah, Pantai The Legend, Wisata Terpadu Bhurunan Mutajih, Wisata Taman Edukasi Titik Sejuta Warna	188.409

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2020-2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jumlah pengunjung obyek wisata jika dihitung secara rata-rata menurun sejak tahun 2019-2022, termasuk di dalamnya pengunjung obyek Ekowisata Mangrove Lembung. Namun, kehadiran obyek Ekowisata Mangrove Lembung menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya kapasitas pariwisata di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Ekowisata Mangrove Lembung yang terletak di Desa Lembung Kecamatan Galis merupakan obyek wisata yang menjadi tujuan lokasi penelitian. Berdasarkan data BPS Tahun 2022-2023 bahwa dari sebanyak 14 destinasi wisata di Pamekasan, obyek Ekowisata Mangrove Lembung memiliki keunggulan dalam hal menawarkan pemandangan berkonsep hutan mangrove. Keunggulan Ekowisata Mangrove Lembung terletak pada potensi keberlanjutan kegiatan konservasi, kelestarian alam dan lingkungan yang dilakukan dan jarang ditemukan pada obyek wisata lain di Pamekasan. Pengembangan konservasi mangrove merupakan bagian dari strategi alternatif dalam pengembangan destinasi wisata (Wahyuni, 2015).

Keunggulan dan unikan lainnya pada obyek Ekowisata Mangrove Lembung aktivitas budidaya mangrove menjadi sumber informasi dan edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum khususnya dalam rangka studi ilmiah baik dalam bidang lingkungan hidup, dan kaitannya dengan harapan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kehadiran dan aktivitas wisatawan pada destinasi dapat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat (Chamidah, Putra, Mansur, & Guntoro, 2021). Proses pembangunan

dan pengembangannya melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, media, dan akademisi.

Keterlibatan aktor pembangunan di Ekowisata Mangrove Lembung bermaksud untuk memberikan dukungan dalam proses pembangunan obyek wisata. Chamidah et al. (2021) menunjukkan bahwa lima aktor yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan disebut *penta helix*. *Penta helix* diartikan sebagai pihak-pihak fundamental pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu proses pembangunan pariwisata, berkontribusi sesuai bidang dan kapasitasnya dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing. Terdapat tiga aktor yang terlibat secara resmi dalam pembangunan obyek Ekowisata Mangrove Lembung, yaitu Perhutani, Dinas Pariwisata, dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis Sabuk Hijau. Sedangkan keterlibatan tidak langsung dari pihak pemerintah desa, pengusaha, media dan akademisi.

Noywuli, Sapei, Pandjaitan, & Eriyatno (2019) menunjukkan bahwa pihak akademisi merupakan salah satu aktor pembangunan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi berdasarkan kesesuaian bidang keilmuan. Pihak akademisi dapat berperan secara optimal melalui pendampingan pembangunan pariwisata sebagai fasilitator mulai dari proses indentifikasi, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pada pengawasan. Di samping itu, Hora (2004) menunjukkan bahwa pihak akademik baik tenaga pengajar ataupun peneliti berdasarkan keahliannya dapat menjadi sumber informasi suatu obyek yang memiliki relevansi dengan bidang keahlian dan profesi. Keterlibatan akademisi dan pihak lainnya

dalam pembangunan pariwisata pada dasarnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Status keberlanjutan ekonomi yang baik pada suatu obyek wisata pantai umumnya memiliki tingkat kunjungan wisatawan tinggi (Alvi et al., 2018). Namun, hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi di Ekowisata Mangrove Lembung. Sejak tahun 2019 eksistensi tingkat pengunjung mengalami penurunan.

Tabel 1.2 Tingkat Pengunjung Ekowisata Mangrove Lembung Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Pengunjung		
	Per Tahun	Rata-rata Per Bulan	Rata-rata Per Hari
2020	8.746 orang	729 orang	24 orang
2021	6.857 orang	571 orang	19 orang
2022	4.929 orang	411 orang	14 orang

Sumber: Data Primer Pokdarwis Sabuk Hijau, 2023

Pengelola Ekowisata Mangrove Lembung pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 telah memanfaatkan momentum kebijakan pemerintah daerah terkait buka tutup obyek wisata, dengan memanfaatkan empat bulan di akhir tahun tersebut berhasil menjual tiket masuk wisata sebanyak 8.746, jumlah tersebut diprediksi setara dengan jumlah pengunjung pada tahun 2019 sebelum diberlakukan tarif masuk wisata. Namun, jumlah pengunjung semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya. Menurun atau rendahnya jumlah pengunjung wisata bisa terjadi karena daya tarik wisata rendah akibat potensi pasar wisata rendah dan kurangnya permodalan masyarakat (Cendrakasih et al., 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah yang harus diatasi sehingga dapat meningkatkan minat pengunjung yang berdampak positif terhadap peningkatan wisatawan yang secara tidak langsung pembangunan wisata dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara

berkelanjutan. Meskipun tahun 2021 Pemerintah telah menggelontorkan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan masuk menuju lokasi wisata, penataan fasilitas parkir, pengadaan toilet, posko pengelola, serta penambahan sarana *tracking* (jalan layang) dan gasibo. Namun, hal itu tidak mampu mendongkrak jumlah pengunjung obyek Ekowisata Mangrove Lembung.

Fitroh, Hamid, & Hakim (2017) menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong kunjungan wisata adalah adanya keunikan-keunikan atraksi wisata, kemudahan aksesibilitas, sarana dan prasarana umum dan pendukung. Maka sangat penting pengelola melakukan upaya peningkatan kapasitas wisata melalui pembangunan infrastruktur akses jalan masuk dan lainnya untuk mempermudah pengunjung menuju wisata. Pengembangan kapasitas wisata tentunya membutuhkan sumber pendanaan yang besar. Sehingga diperlukan promosi agar dapat menarik minat pihak investor untuk terlibat dalam proses pengembangan wisata dengan memberikan suntikan dana permodalan. Persoalan keterbatasan pendanaan dalam proses pengembangan wisata tidak cukup hanya mengandalkan sumber dana dari pemerintah sehingga agar proses pengembangan wisata mangrove menjadi lebih optimal perlu ada dorongan dan keterlibatan pihak kelembagaan swasta (Rozikin, 2019).

Keterlibatan pihak swasta diduga lemah mengakibatkan menurunnya tingkat pengunjung dan melambatnya proses pembangunan wisata mangrove. Husamah & Huda (2018) menunjukkan bahwa upaya pengembangan wisata harus dilakukan dengan baik agar tercipta budaya tata kelola yang dapat menjamin keberlangsungan konservasi alam dan budaya sehingga mampu meningkatkan

ketahanan ekonomi dan sosial. Keberlanjutan sosial dapat ditunjukkan dengan adanya solidaritas dan kepedulian masyarakat pada obyek wisata. Obyek Ekowisata Mangrove Lembung seringkali mendapat kunjungan dari lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, hal ini menunjukkan obyek Ekowisata Mangrove Lembung mendapatkan perhatian dari masyarakat umum untuk dikunjungi.

Subhan & Hidayat (2018) menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal, agar mampu menghasilkan produk bermutu tinggi sebagai jembatan alternatif dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan wisata diperlukan kehadiran pemerintah dan keterlibatan aktor kelembagaan lainnya. Sehingga tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi lebih mudah tercapai. Kehadiran aktor dalam pembangunan dan pengembangan suatu obyek pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sangat penting karena akan mampu membentuk suatu kekuatan yang kokoh. Rozikin (2019) menunjukkan bahwa pariwisata membutuhkan peran penting aktor dalam suatu proses pembangunan berkelanjutan.

Fairuza (2017) menunjukkan bahwa Kehadiran dan keterlibatan aktor-aktor pembangunan pariwisata menjadi *support system* dalam membentuk kekuatan optimal karena berbagai bentuk keputusan dan strategi dalam mencapai tujuan dilaksanakan secara bersama-sama melalui diskusi, menciptakan kesepahaman visi, meringankan tugas dan tanggung jawab serta dapat menentukan bersama model dan arah pembangunan. Namun, keterlibatan aktor-

aktor dalam proses pembangunan dan pengembangan obyek Ekowisata Mangrove Lembung diduga menimbulkan dampak konflik lintas sektoral dan kelembagaan.

Permasalahan kelembagaan dilatarbelakangi ego personal dan ego sektoral menyebabkan pembangunan Ekowisata Mangrove Lembung diduga tidak berkelanjutan. Diduga terjadi konflik antara Pemerintah Desa Lembung dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sabuk Hijau. Keduanya merupakan rival politik sehingga konflik terjadi atas dasar kepentingan politik. Pemerintah Desa dalam hal ini menginginkan pengelolaan wisata diserahkan kepada pihak Pemerintahan Desa Lembung dengan alasan obyek wisata tersebut berada di wilayah desa, sedangkan Ketua Pokdarwis Sabuk Hijau selaku aktivis lingkungan hidup tetap kokoh mempertahankan pengelolaannya terpisah dari pemerintah desa, sehingga koordinasi dan penyerahan kontribusi pendapatan langsung diserahkan pada pemerintah daerah.

Obyek Ekowisata Mangrove Lembung memiliki potensi daya tarik yang tinggi. Panorama alam memberikan nuansa pemandangan yang indah dan menawarkan kekayaan budaya lokal. Aktivitas budi daya mangrove melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, produksi kopi dan teh mangrove dikelola secara berkala. Namun, pengelolaan sampah diduga tidak dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik sehingga limbah sampah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Husamah & Hudha (2018) bahwa masalah limbah sampah yang dapat menimbulkan emisi gas dan pencemaran air dapat dilakukan melalui pengendalian jumlah pengunjung dengan menerapkan sistem *Willingness to Pay* (WTP) dengan cara mengatur harga tiket lebih tinggi

pada hari libur dan akhir pekan. Di samping itu, diduga ketersediaan lahan wisata yang sempit dapat menimbulkan kerumunan pengunjung yang berakibat pada kerusakan mangrove dan fasilitas wisata.

Secara spesifik permasalahan yang berkembang di obyek Ekowisata Mangrove Lembung diduga aspek ekonomi dengan kategori kurang berkelanjutan (Alvi et al., 2018). Status aspek ekonomi kurang berkelanjutan karena belum ada pihak yang mau memberikan permodalan kepada masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi. Sedangkan sosial kelembagaan, infrastruktur, dan lingkungan tidak berkelanjutan disebabkan kendala konflik kelembagaan dan aksesibilitas serta pengelolaan limbah sampah menimbulkan pencemaran. Sehingga untuk mengungkap permasalahan, mengetahui dan memperoleh solusi, penelitian berfokus pada analisis keberlanjutan pariwisata dari aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan kelembagaan serta mengetahui strategi yang terbaik dalam melakukan pembangunan selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan gap penelitian dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana status keberlanjutan pariwisata pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan kelembagaan obyek Ekowisata Mangrove Lembung di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana menyusun prioritas strategi pembangunan untuk keberlanjutan pariwisata obyek Ekowisata Mangrove Lembung di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait perkembangan konsep pembangunan pariwisata. Tujuan pembangunan pariwisata yang diharapkan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang dapat dinikmati pada saat ini namun juga memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status keberlanjutan pariwisata pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan kelembagaan obyek Ekowisata Mangrove Lembung di Kabupaten Pamekasan
2. Untuk menyusun prioritas strategi pembangunan untuk keberlanjutan pariwisata obyek Ekowisata Mangrove Lembung di Kabupaten Pamekasan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hasil yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan keilmuan bidang ekonomi mengenai konsep pembangunan pariwisata baik secara mikroekonomi dan makroekonomi.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah baik Pusat, Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi khususnya di sektor pariwisata, sebagai rekomendasi solusi masalah

terkait pembangunan bagi pengelola wisata, sebagai peluang dan pilihan investasi bagi para pelaku bisnis, sebagai informasi menarik bagi masyarakat dalam memilih destinasi wisata, serta bermanfaat bagi pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepentingan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan tidak melebar, tepat sasaran dan fokus pada masalah utama yang akan dipecahkan. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini mengkaji dan membahas masalah keberlanjutan pariwisata (*tourism sustainability*).
2. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori dan konsep yang berkaitan dengan topik penelitian tentang *sustainable development*, keberlanjutan pariwisata, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan infrastruktur, dan keberlanjutan kelembagaan.
3. Penelitian berlokasi di “Ekowisata Mangrove Lembung” yang berada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi.